

Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kota Palembang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

REZA ARISKA

07011381924140

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

REZA ARISKA

NIM. 07011381924140

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2023

Pembimbing

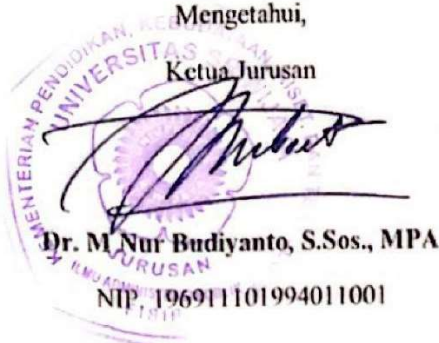


Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR DI KOTA
PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada
Tanggal 21 Maret 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002
Penguji



Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005
Penguji



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing

Dekan FISIP UNRSI,

Mengetahui

Ketua Tim Penguji

Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ariska

NIM : 07011381924140

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 31 Maret 2023



Reza Ariska

07011381924140

ABSTRAK

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian dan analisis terhadap efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat atau target yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan penanganan banjir di kota Palembang. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di kota Palembang yaitu dengan cara membuat kebijakan terkait banjir. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih mengalami berbagai masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan evaluasi agar kebijakan tersebut bisa mengurangi dan menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanganan banjir di Kota Palembang masih belum berhasil. Oleh karena itu masih perlunya dilakukan evaluasi-evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.

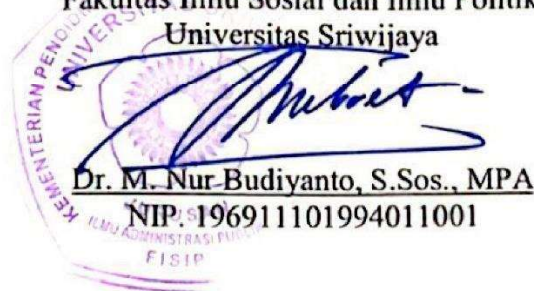
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Banjir

Pembimbing



Drs. Mardianto, MSi
NIP. 196211251989121001

Indralaya, 21 Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAC

Policy evaluation is a process of assessing and analyzing the effectiveness, efficiency, and relevance of policies, as well as their impact on society or the intended targets. This study aims to determine the success of the flood management policy in the city of Palembang. The government's efforts to overcome the problem of flooding in the city of Palembang, namely by making policies related to flooding. In implementing this policy, there are still various problems. To overcome this problem, the government is conducting an evaluation so that this policy can reduce and solve the problem of flooding in the city of Palembang. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation, and literature study. The results of this study indicate that the implementation of flood management policies in Palembang City is still not successful. Therefore it is still necessary to carry out periodic evaluations of these policies.

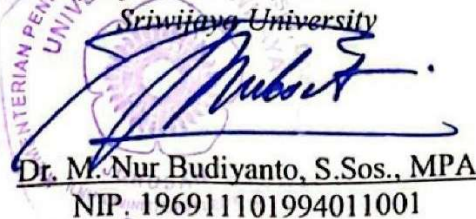
Keywords: Policy Evaluation, Flood

Advisor



Drs. Mardianto, MSi
NIP. 196211251989121001

Indralaya, 21 Maret 2023
Head Of Public Administration Departement
Faculty Of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena berkat rahmat & karunia-nya lah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kota Palembang”. proposal skripsi ini dibuat berdasarkan dengan data yang telah di ambil dan teliti di badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera selatan.

Proposal skripsi ini disusun untuk menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan laporan usulan penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan proposal ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menjalankan dan menyelesaikan penulisan proposal ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, Wakil Dekan I, Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd, Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan ilmu Administrasi Publik angkatan 2019

Palembang, 2022

Reza Ariska

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	viiiv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Kebijakan Publik	19
2.1.1 Proses Pembentukan Kebijakan Publik.....	21
2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	25
2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	26
2.2.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan.....	31
2.2.2 Hakikat Evaluasi.....	34
2.2.3 Pendekatan terhadap Evaluasi.....	36
2.3 Bencana Banjir	38
2.4 Peraturan dan Perundangan Tentang Banjir	43
2.5 Penelitian Terdahulu.....	53
2.6 Kerangka Berpikir	57
BAB 3 METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Definisi Konsep	58
3.3 Fokus Penelitian	59

3.4	Informan Penelitian	60
3.5	Jenis dan Sumber Data	61
3.6	Teknik Pengumpulan Data	62
3.7	Teknik Analisis Data	63
3.8	Jadwal Penelitian	65
3.9	Sistematika Penulisan	65
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	67
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	70
4.2	Hasil Penelitian	75
4.2.1	keberhasilan kebijakan penangan banjir di kota Palembang	75
4.2.2	Efektivitas Kebijakan	78
4.2.3	Efisiensi Dalam Pelaksanaan	80
4.2.4	Kecukupan Terhadap Kebutuhan	83
4.2.5	Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	86
4.2.6	Responsivitas	88
4.2.7	Ketepatan Program	90
4.3	pembahasan	91
BAB 5	PENUTUP	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Peta Sebaran Banjir Kota Palembang	10
Gambar 0.2 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang.....	12
Gambar 4.1 Peta Kota Palembang.....	67
Gambar 4.2 sampah di bantaran sungai.....	79
Gambar 4.3 Pembuatan Lubang Biopori	81
Gambar 4.4 Revitalisasi Sungai dan Danau	81
Gambar 4.5 Normalisasi Sungai.....	82
Gambar 4.6 genangan di jalan.....	85
Gambar 4.7 proses penyedotan genangan	85

DAFTAR SINGKATAN

SDGs : Sustainable Development Goals

Dinas PUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DAS : Daerah Aliran Sungai

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sumatera Selatan	6
Tabel 2 Data Genangan di Kota Palembang.....	8
Tabel 3 potensi bahaya bencana banjir provinsi sumatera selatan.....	11
Tabel 4 Kriteria Evaluasi	30
Tabel 5 Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn	36
Tabel 6 Fokus Penelitian.....	59
Tabel 7 Key Informan.....	61
Tabel 8 Jadwal Penelitian	65

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bahasa Indonesia. SDGs merupakan serangkaian tujuan dan target pembangunan global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs bertujuan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, sosial, dan lingkungan yang seimbang di seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang terdiri dari 169 target dan memandang pembangunan secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ialah pembangunan yang menjaga dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan serta terlaksananya suatu tata kelola yang bisa menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi seterusnya.

Tujuan SDGs adalah untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan orang-orang saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Tujuan-tujuan SDGs yang lebih spesifik antara lain: 1) Mencapai kemiskinan yang nol dan memberikan akses kepada semua orang terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. 2) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi semua orang serta memastikan

keberlanjutan produksi pangan. 3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan semua orang, termasuk mengurangi angka kematian bayi dan anak-anak serta menanggulangi penyakit menular. 4) Memberikan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas dan peluang belajar seumur hidup. 5) Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. 7) Meningkatkan akses ke energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. 9) Meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan berinovasi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10) Mengurangi ketimpangan dalam semua bentuknya, termasuk dalam akses ke sumber daya dan layanan. 11) Membangun kota dan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan aman. 12) Mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. 13) Mengambil tindakan untuk melindungi bumi dan mengatasi perubahan iklim. 14) Melindungi dan memulihkan kehidupan bawah air dan ekosistem yang terkait. 15) Meningkatkan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kehidupan darat. 16) Meningkatkan perdamaian, keadilan, dan lembaga-lembaga yang kuat serta mengurangi kekerasan dan korupsi. 17) Meningkatkan kemitraan global untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs secara bersama-sama

Salah satu tujuan SDGs yang terdapat pada poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Tak ada satu pun negara di dunia yang tak terkena dampak

secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan pada saat ini levelnya berada pada 50 % lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1990. Selanjutnya, pemanasan global juga menyebabkan perubahan berkepanjangan terhadap sistem iklim kita, serta konsekuensi yang terjadi tak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan. Kerugian rata-rata tahunan dampak bencana seperti gempa bumi, tsunami, badai tropis serta banjir terhitung kurang lebih ratusan miliar dolar, dan ini memerlukan investasi sebanyak US\$6 miliar per tahun buat biaya pengelolaan risiko bencana saja. Tujuan ini berusaha mengumpulkan US\$100 miliar per tahun pada 2020 buat memenuhi seluruh kebutuhan negara-negara berkembang serta membantu mengurangi bencana dampak perubahan iklim. Menyadari perubahan iklim ialah satu dari 17 Tujuan dunia yang tersusun dalam rencana Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sekitar khatulistiwa di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Dengan total luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia adalah negara terbesar ke-14 di dunia berdasarkan luas wilayah. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan tiga samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, mencapai lebih dari 54.000 kilometer, dan wilayah perairan yang luas.

Pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Kalimantan, Sumatra, Papua, Sulawesi, dan Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan negara ini. Selain itu, Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang masih belum dihuni, serta pulau-

pulau yang menjadi tempat wisata yang populer seperti Bali, Lombok, dan Pulau Komodo. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berbagai suku dan budaya yang berbeda tinggal di wilayah yang luas, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis dan kebudayaan yang kaya. Namun, kondisi geografis Indonesia juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, mengingat Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang penting bagi keseimbangan ekologi global

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan pengertian bencana sebagai kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta mengakibatkan kerugian material dan/atau korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerusakan ekonomi yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera.

Berdasarkan definisi diatas, bencana adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Bencana bisa berupa alam, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan erupsi gunung berapi, atau bencana buatan manusia, seperti kecelakaan industri, kebakaran, dan terorisme. Dalam konteks undang-undang, bencana dianggap sebagai suatu keadaan yang memerlukan respons dan penanganan segera dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik itu dalam hal penanganan korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Undang-Undang Penanggulangan Bencana juga menekankan pentingnya upaya pencegahan bencana dan mitigasi risiko bencana, sehingga diharapkan masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana dan berbagai dampak negatifnya.

Bencana alam adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti geologi, meteorologi, hidrologi, dan lingkungan, dan mengakibatkan kerugian material dan/atau korban jiwa. Contoh bencana alam yang sering terjadi antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan badai. Gempa bumi terjadi ketika terjadi pergeseran atau pembebanan besar pada lempeng bumi, sedangkan tsunami adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gempa bumi laut, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Banjir terjadi ketika aliran sungai meluap akibat curah hujan yang tinggi atau karena bangunan dan sistem drainase yang buruk. Longsor terjadi ketika tanah bergerak dan jatuh ke bawah, dan kebakaran hutan terjadi ketika api membesar dan meluas di hutan dan lahan gambut yang kering. Badai adalah kondisi cuaca yang ditandai dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang laut tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan besar.

Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah dan mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan. Selain mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi, bencana alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan iklim. Pencegahan dan mitigasi risiko bencana alam menjadi penting untuk mengurangi dampak

negatif bencana pada kehidupan manusia dan lingkungan. Upaya pencegahan bencana alam meliputi pengelolaan risiko bencana, pendidikan dan sosialisasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang tahan bencana, seperti sistem peringatan dini, tanggul, dan gedung yang dirancang tahan gempa

Tabel 1 Rekapitulasi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa)				Kelas
		Jumlah penduduk terpapar	Kelompok rentan			
			Penduduk umur rentan	Penduduk miskin	Penduduk cacat	
1.	Banjir	8.819.552	1.020.263	2.660.046	34.547	Tinggi
2.	Banjir Bandang	559.004	68.398	200.359	2.539	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	9.052.992	1.047.338	2.740.667	36.287	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	32.813	3.400	19.940	129	Tinggi
5.	Gempa Bumi	10.282.532	1.195.364	3.265.349	42.008	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	548.744	408.665	538.024	1.495.434	Tinggi
7.	Kekeringan	10.281.483	1.195.261	3.264.853	42.006	Tinggi

Sumber RPB Provinsi Sumatera Selatan 2022-2026

Bencana adalah kejadian yang tidak terduga dan dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam skala besar, baik pada aspek fisik maupun psikologis. Ancaman yang dihadapi oleh masyarakat akibat bencana sangat

beragam. Beberapa dampak yang umum terjadi adalah kerusakan fisik pada bangunan, infrastruktur, dan properti, hilangnya sumber daya alam, hilangnya nyawa, dan kerusakan pada lingkungan. Selain itu, bencana juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial, seperti hilangnya sumber penghasilan dan pekerjaan, serta terjadinya migrasi atau pengungsian. Ancaman dari bencana tidak hanya terbatas pada kerugian material, namun juga dapat menyebabkan trauma dan stres psikologis bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Banyak korban bencana mengalami ketakutan, kecemasan, dan depresi akibat kejadian yang menakutkan dan merusak. Dampak ini dapat berlangsung lama bahkan setelah bencana berakhir.

Karena itu, bencana dianggap sebagai sebuah ancaman serius bagi masyarakat. Untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi sebelumnya, seperti membangun infrastruktur yang tahan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memberikan pendidikan tentang tindakan darurat dalam menghadapi bencana

Bencana bisa terjadi dimana saja dengan sedikit atau tanpa peringatan, maka akan sangat penting untuk bersiaga pada bahaya bencana buat meminimalisir resiko dampak bencana. Selanjutnya, supaya masyarakat bisa mengetahui cara-cara dalam penanggulangan bencana sehingga bisa meminimalisir ancaman serta dampaknya, menyiapkan diri secara tepat dan tanggap Jika terjadi ancaman, menyelamatkan diri, serta bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi. Penanganan terhadap ancaman bencana yang tak mengenal waktu serta tempat, juga memerlukan pengelolaan secara

menyeluruh baik dari sebelum terjadinya bencana, saat terjadi bencana ataupun pula pasca terjadinya bencana. Penanganan bencana wajib diselesaikan secara terpadu serta terkoordinasi, dan menekankan terhadap upaya penanganan secara sistematis, juga dengan kebijakan-kebijakan yang terkait.

Banjir adalah kondisi saat air meluap dari saluran air atau sungai dan membanjiri daratan yang seharusnya tidak tergenang air. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi, meluapnya air di danau atau bendungan, atau karena faktor lain seperti meluapnya air laut akibat badai atau tsunami.

Banjir dapat terjadi di daerah perkotaan atau pedesaan dan memiliki dampak yang merugikan, termasuk kerusakan pada bangunan, hilangnya tanaman atau ternak, dan bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan terjadinya longsor, tanah urug, dan penyebaran penyakit yang terkait dengan air.

Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir, termasuk memperkuat sistem drainase, meningkatkan pengelolaan air, memperbaiki sistem peringatan dini, dan mengembangkan rencana evakuasi untuk mengurangi risiko dan dampak yang disebabkan oleh banjir.

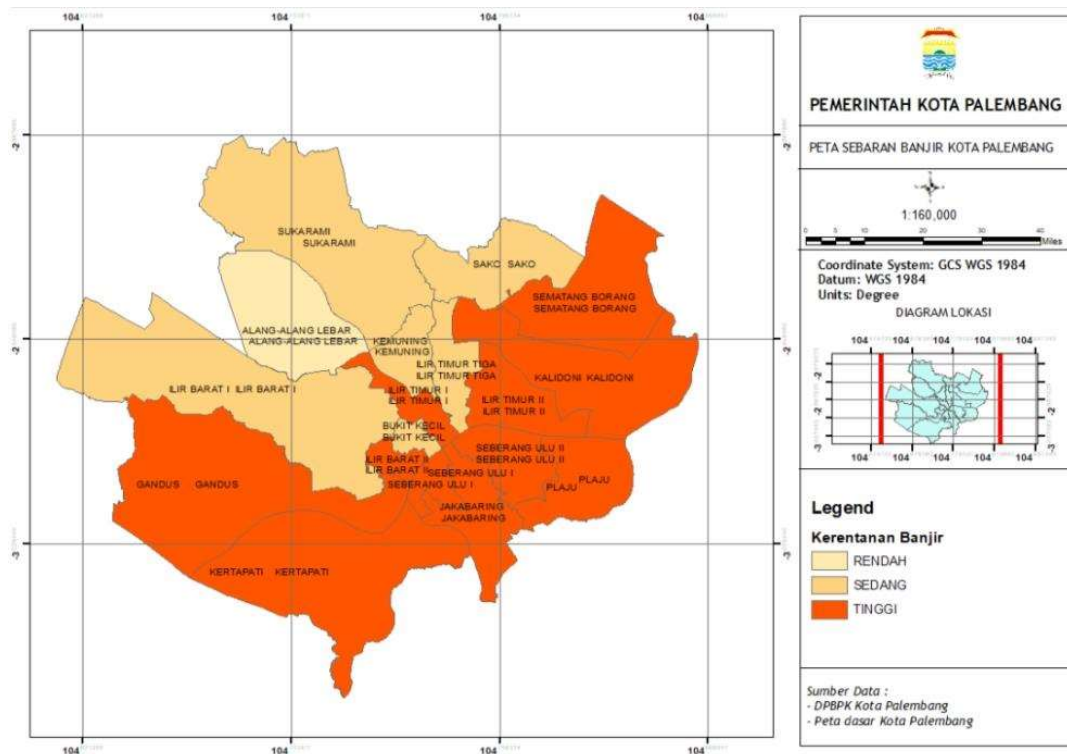
Tabel 2 Data Genangan di Kota Palembang

No	Lokasi Genangan	Kecamatan
1.	Jl. Soekarno-Hatta	Alang-Alang Lebar
2.	Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II	Alang-Alang Lebar/Sukarami

No	Lokasi Genangan	Kecamatan
3.	Jl. Kapt. A. Rivai	Iilir Timur I
4.	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara	Gandus
5.	Jl. Prameswara	Iilir Barat I
6.	Jl. Angkatan 45	Iilir Barat I
7.	Jl. Demang Lebar Daun	Iilir Barat I
8.	Jl. Sultan Muh. Mansyur	Iilir Barat I
9.	Jl. Puncak Sekuning	Iilir Barat I
10.	Jl. Macan Kumbang-Jl. Kancil Putih	Iilir Barat I
11.	Jl. Jendral Sudirman	Iilir Timur I/Kemuning
12.	Jl. Gub. H. Bastari	Seberang Ulu I
13.	Jl. A. Yani	Seberang Ulu II
14.	Jl. Kh. Wahid Hasyim	Seberang Ulu I
15.	Jl. Ki Merogan	Kertapati
16.	Jl. R. Sukamto	Iilir Timur II/Kemuning
17.	Jl. Sentosa	Plaju
18.	Jl. Ryacudu	Seberang Ulu I
19.	Jl. Veteran	Iilir Timur I
20.	Jl. Mayor Ruslan	Iilir Timur II

Sumber Satu Data Palembang

Gambar 0.1 Peta Sebaran Banjir Kota Palembang



Biasanya bencana banjir yang kerap terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal saat musim penghujan datang, sebagai akibatnya sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai serta anak sungai alamiah dan sistem saluran drainase serta kanal penampung banjir buatan yang ada tak cukup bisa menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan atau daya tampung sistim pengaliran air yang di maksud tak selamanya sama, namun bisa berubah yang diakibatkan oleh sedimentasi, penyempitan sungai dampak fenomena alam serta ulah manusia, Penggundulan hutan di terutama daerah tangkapan air hujan (catchment area) pula yang mengakibatkan peningkatan debit banjir.

Ancaman banjir berpotensi terjadi sebab Sumatera Selatan mempunyai DAS yang beredar di seluruh wilayah Sumatera Selatan. DAS yang ada pada

saat ini hampir sebagian besar tak bisa lagi menampung debit air sebagai akibatnya terjadi luapan air yang menggenangi daerah sepanjang sungai. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan curah hujan dampak dari perubahan iklim, adanya alih fungsi lahan hutan yang tak terkontrol dan pemanfaatan DAS sebagai kawasan budidaya. Berkurangnya daerah resapan serta daerah terbuka hijau pada kawasan permukiman/perkotaan turut pula berkontribusi menambah potensi ancaman banjir.

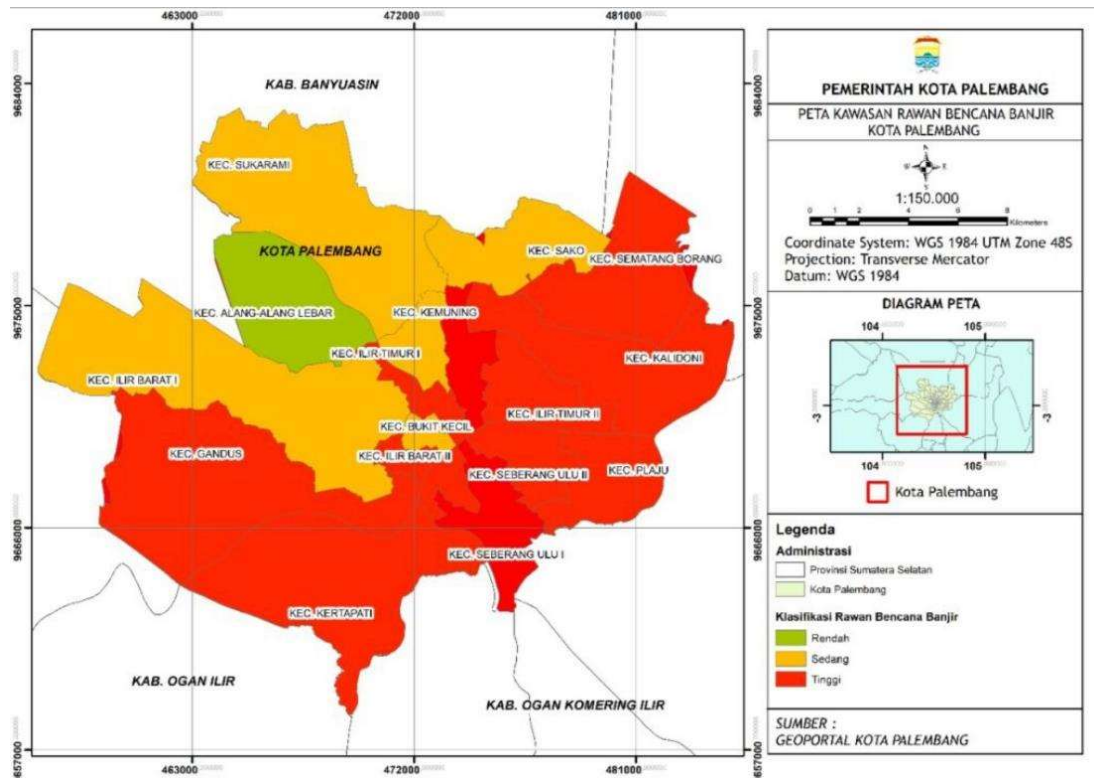
Potensi bahaya banjir menunjukkan jumlah luas wilayah yang mempunyai kondisi rawan terhadap bencana banjir didasarkan dari kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi sesuai dengan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terkena bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sesuai dengan melihat kelas bahaya maksimum semua Provinsi Sumatera Selatan yang terkena banjir.

Tabel 3 potensi bahaya bencana banjir provinsi sumatera selatan

No	Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Kota Lubuk Linggau	16.661,00	6.119,00	348,00	23.128,00	Tinggi
2.	Kota Pagar Alam	4.474,00	3.870,00	2.074,00	10.418,00	Tinggi
3.	Kota Palembang	35.758,00	18.316,00	9.313,00	63.387,00	Tinggi
4.	Kota Prabumulih	17.174,00	5.69,00	269,00	23.141,00	Sedang

Sumber RPB Provinsi Sumatera Selatan 2022-2026

Gambar 0.2 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang



Permasalahan banjir masih menghantui warga Kota Palembang, bahkan setiap musim hujan terjadi hampir sebagian ibu kota Provinsi Sumsel tersebut tergenang air, terutama pada jalan-jalan protokol serta pemukiman. Banjir dan genangan air pada sejumlah titik Palembang masih terus terjadi. contohnya, banjir di daerah Bendungan Simpang Polda yang menjadi langganan genangan air saat turun hujan dengan intensitas tinggi. Pengelolaan tata ruang perkotaan yang serampangan, penggunaan areal serapan air yang masif buat pemukiman, sampai perambahan hutan pada kawasan hulu sungai ditengarai menjadi penyebab melemahnya daya dukung lingkungan saat terjadinya hujan deras. Sejumlah tempat terendam air, mulai dari pusat kota sampai area pemukiman warga. Tak tanggung, ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Setiap tahun dilakukan penambahan kolam retensi, terutama pada lokasi yang rawan banjir. Tetapi, keberadaan kurang lebih 42 kolam retensi di Kota

Palembang itu pula relatif tak membantu bila hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Bukan hanya kolam retensi, eksistensi pompa air yang memakai sistem pompanisasi pula kurang membantu pada waktu cuaca ekstrem itu melanda. Muka air Sungai Musi telah di atas muka air pada daratan Kota Palembang.

Pada 5 oktober 2022 curah hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Palembang, membuat hampir semua sudut kota mengalami banjir. Hal ini ditimbulkan karena meluapnya sungai musu. Ruas titik banjir tersebut berada pada kawasan jalan R soekamto, sekup bendung serta seduduk putih. pada lokasi tersebut air menggenangi jalan kurang lebih 20 cm, sebagai akibatnya banyak kendaraan yang sangat ekstra waspada saat akan melewati kawasan tersebut. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, curah hujan yang tinggi pada waktu itu merupakan kejadian langka yang dialami selama 30 tahun terakhir. berdasarkan catatan mereka, curah hujan ekstrem terakhir kali terjadi pada 6 Oktober 1980 lalu. Akibat banjir ini selain jalanan macet parah, sejumlah sekolah juga terpaksa harus meliburkan siswanya atau memberikan toleransi datang telat, sebab jalan macet parah diakibatkan banjir.

Daerah aliran sungai adalah area atau wilayah yang dibatasi oleh lereng-lereng atau pegunungan yang berfungsi untuk menampung air hujan atau air permukaan lainnya yang akan mengalir ke sungai atau anak sungai. Daerah ini juga disebut sebagai cekungan sungai atau basin sungai. Semua air yang jatuh di atas daerah ini akan mengalir ke arah sungai atau anak sungai yang berada di tengah-tengah daerah tersebut.

Daerah aliran sungai terdiri dari berbagai elemen, seperti tanah, vegetasi, sungai, dan semua bentuk kehidupan di dalamnya. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Tanah dan vegetasi dalam daerah aliran sungai sangat penting dalam menahan dan menyerap air hujan, sehingga dapat memperlambat aliran air dan mengurangi banjir.

Daerah aliran sungai dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah wilayah yang berada di sekitar bagian atas sungai dan terletak di lereng-lereng gunung. Dataran rendah adalah wilayah yang terletak di sepanjang sungai dan sekitar muara sungai.

Curah hujan yang tinggi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Palembang. Banjir serta genangan air yang timbul, jadi konflik berulang setiap musim penghujan yang tak kunjung bias terselesaikan. Pemerintah Kota Palembang sebenarnya mempunyai Pompa Pengendali Banjir Sub daerah aliran Sungai (DAS) Bendung Kota Palembang yang terselesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2019. Pompa ini dibangun dengan tujuan agar bisa mengurangi banjir di kota Palembang. Sistem Pengendali Banjir Kota Palembang ini dilengkapi dengan kolam retensi dengan daya tampung sebanyak 50.000 m³ serta pintu air otomatis. Pompanya sendiri mempunyai spesifikasi tipe pompa submersible drainage pump dengan kapasitas 6.000 ltr/detik yang dianggap bisa mengurangi genangan sebanyak 245 Ha.

Akan tetapi pada saat ini, pompa tak berjalan maksimal. Padahal, Sungai Bendung sudah berada di tengah kota Palembang. Posisinya inilah yang menjadi alasan dibangunnya pompa dengan tujuan agar bias mengurangi air yang menggenangi sebagian besar wilayah kota Palembang itu. Hanya saja, hadirnya pompanisasi ini belum menjawab bagaimana cara mengatasi banjir atau genangan yang sudah meluas. Tak hanya di tengah kota namun pula sudah sampai ke wilayah pinggiran kota Palembang.

Pemkot Palembang telah mengajukan pengadaan 15 unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik di tahun anggaran 2023. Rencananya pompa tadi akan ditempatkan pada sejumlah kolam retensi yang strategis. Langkah ini diperlukan guna untuk mengurangi titik lokasi banjir di Palembang. Eksistensi pompa dirasa sangat mendesak mengingat titik rawan banjir di Palembang masih tergolong tinggi, yakni sekitar 15 sampai dengan 33 titik.

Salah satu penyebab titik banjir masih tergolong banyak ialah diakibatkan tersumbatnya aliran air ke kolam retensi dampak saluran drainase yang kurang optimal. Padahal, kolam retensi telah dibangun sebagai ruang buat air saat air sungai pasang ataupun hujan lebat mengguyur. Kolam retensi pula sudah terhubung langsung dengan anak-anak Sungai Musi sebagai akibatnya bisa mengurangi risiko banjir pada daerah sekitarnya.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Korea Selatan di tahun 2016 menunjukkan bahwa Palembang setidaknya membutuhkan kurang lebih 120 unit kolam retensi. Kolam-kolam retensi itu diperlukan seiring dengan kian pesatnya pembangunan kota. Nyatanya, hingga kini kolam retensi tersebut

baru terlaksana sebanyak 46 kolam. Kolam retensi yang dinilai membutuhkan pompa diantaranya kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Basuki Rahmat, Universitas IBA, Jalan R Soekamto, dan Jalan Residen Abdul Rozak. Adapun anggaran yang diperlukan buat pengadaan satu unit pompa berkapasitas 1.000 liter per dtk kurang lebih Rp 3 miliar. dengan kebutuhan 15 unit pompa, anggaran yang akan diusulkan mencapai Rp 45 miliar.

Palembang mempunyai banyak sekali anak sungai dan 49 % daratannya ialah dataran rendah atau rawa. Tetapi, pada kota Palembang hanya ada satu pintu air, sebagai akibatnya banjir kerap terjadi waktu musim hujan datang. Tercatat ada 42 anak Sungai Musi yang beredar di sekitar daerah seberang hulu serta hilir yang bermuara ke Sungai Musi. Tetapi, situasi itu belum ditangani dengan maksimal. Buktinya baru ada satu pintu air lengkap dengan pompa yang berada di Sungai Bendung.

Minimnya pintu air membuat air sulit mengalir ke sungai serta mengakibatkan banjir. Idealnya diperlukan pintu air tambahan berikut pompa pada setiap anak sungai buat meminimalisasi genangan waktu hujan. Buat merealisasikannya terbilang sulit sebab diperlukan banyak anggaran. Satu pintu air kecil seukuran tiga meter saja diperlukan paling tidak Rp10 miliar. sementara jumlah anak sungai pada Kota Palembang sebanyak 42 titik

Selanjutnya Dengan dibuatnya Peraturan daerah No 11 Tahun 2012, diharapkn Pemerintah kota Palembang bisa mengendlikan pemanfaatan lahan rawa. karena Pemerintah kota Palembang, berdasarkan dengan pasal 4 dan 5 Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 melakukn pengendalian penggunaan

lahan rawa supaya tak mudah dan cepat terjadi perubahan fungsinya sebagai wilayah penyangga air yang telah diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa wilayah di kota Palembang yang seharusnya menjadi kawasan rawa, malah ditimbun buat kepentingan perumahan, pertokoan, dan sebagainya.

Disebabkan oleh penimbunan rawa pula sudah mengurangi jumlah anak sungai yang berfungsi sebagai saluran drainase, dari 280 anak sungai kini hanya tersisa sekitar 60 anak sungai. Kondisi inilah yang mengakibatkan air hujan tak bisa mengalir dengan sempurna ke Sungai Musi. Karenanya, kota Palembang terus dilanda banjir, baik dari hujan maupun pasang surutnya Sungai Musi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian perihal keberhasilan kebijakan penanganan banjir di kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah ialah, Bagaimana keberhasilan kebijakan penanganan banjir di kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kebijakan penanganan banjir di kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan penulis dan bagi mahasiswa/mahasiswi administrasi publik.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu administrasi publik. Dan juga agar dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun kepustakaan untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dalam menganalisis kebijakan publik.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kebijakan penanganan banjir di kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- , Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>
- Ambarwati. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Al Qalam Media Lestari.
- Ardial. (2022). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Bumi Aksara.
- Ayuningtyas, R. N., & Rahayu, S. (2014). Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Banjir Di Kelurahan Ulujami, Jakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 351–358.
- Dailati, S. (2018). *Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Jakad Media Publishing.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Fitrianto, H., Muzaqqi, F., & Sahab, A. (n.d.). *Hidup Masyarakat Rentan Miskin Di Jawa Timur*. 7(2), 75–96.
- Guswanto, D. (2014). Evaluasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surabaya. *Administrasi Publik*, 12(1), 73–84.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Kabupaten, D. I., Selatan, M., & Sulawesi, P. (2015). *www.antaranews.com*). 18.
- Moshinsky, M. (1959). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Pudjiastuti, M. I., Idris, A., & Kusuma, A. R. (2019). Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Sebagai Rumah Sakit Rujukan. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2922>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rizkiah, R., Poli, H., & Supardjo. (2014). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 105–112.
- Ruswadi, I. (2021). *KEPERAWATAN JIWA*. Penerbit Adab.

- Samuel, I., & Mandas, T. (2018). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62), 92–98.
- Septian, A., Elvarani, A. Y., Putri, A. S., Maulia, I., Damayanti, L., Pahlevi, M. Z., & Aswad, F. H. (2020). Identifikasi Zona Potensi Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Metode Overlay dengan Scoring di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/10.23960/jgrs.2020.v1i1.25>
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. CV SAH MEDIA.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 1–12.
- Sukardi. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas*. Bumi Aksara.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala HerangSubang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159–178. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Taruno, H. T. (2017). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang. *Journal of Governance*, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2676>
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di*. 5(1), 28–42.
- Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2020). Journal of Government Civil Society. *Journal of Government Civil Society*, 4(April), 115–129.